

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG

KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG**

Alamat Jl. Batu Babalik RT.03 Desa Lok Tanah

Kecamatan Telaga Bauntung

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70673

Website : <https://kec-telagabauntung.banjarkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

LKjIP Kecamatan Telaga Bauntung ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban Kecamatan Telaga Bauntung dalam menjalankan kegiatan - kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang diemban. Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan sosial dan ekonomi.

Kecamatan Telaga Bauntung telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Telaga Bauntung sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Telaga Bauntung, 10 Februari 2025
Plh. Camat Telaga Bauntung



Dr. Haris Utomo, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19851109 200412 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Telaga Bauntung.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar 2021-2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 1 sasaran strategis Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan masuk pada kriteria ***Sangat Tinggi*** dengan nilai capaian sebesar **94,38** dimana target pada tahun 2024 sebesar **79**, sehingga persentase capaian terhadap sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan mencapai **119,49%**.

Tantangan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kecamatan Telaga Bauntung yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mempunyai kompetensi. Hingga saat ini, sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kualitas dan kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Pemerintah Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dalam rangka perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Telaga Bauntung berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Telaga Bauntung adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Besaran Pagu anggaran Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp 2.581.189.967,00,-	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. MAKSUD DAN TUJUAN	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. ISU STRATEGIS	5
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	8
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
A. TUJUAN STRATEGIS	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
C. PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN TUJUAN STRATEGIS	19
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
C. REALISASI ANGGARAN	97
BAB IV	109
PENUTUP	109
A. KESIMPULAN	109
B. SARAN-SARAN	109
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kepegawaian Kecamatan Telaga Bauntung per 31 Desember 2024.....	5
Tabel 1. 2 Permasalahan pada Kecamatan Telaga Bauntung	6
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	13
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3. 2 Realisasi Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	39
Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir	45
Tabel 3. 5 Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	50
Tabel 3. 6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	60
Tabel 3. 7 Laporan Hasil Evaluasi AKIP	86
Tabel 3. 8 Realisasi Jenis Belanja Tahun 2024.....	98
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	99
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun 2024	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Telaga Bauntung.....	4
Gambar 3. 1 Diagram Capaian Sasaran Kinerja	23
Gambar 3. 2 Perbaikan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan	92
Gambar 3. 3 penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2024)	93
Gambar 3. 4 Koordinasi internal dalam rangka pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit sampai pada kinerja staf/pelaksana	94
Gambar 3. 5 Koordinasi Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) secara Lengkap	95
Gambar 3. 6 Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pengawasan Implementasi AKIP Internal	96
Gambar 3. 7 Rapat Evaluasi Internal secara Berkala dan Menindaklanjuti Hasil Evaluasi	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Telaga Bauntung
- b. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Telaga Bauntung
- c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
- d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

2. Tujuan

- a. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Telaga Bauntung kepada Bupati
- b. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Telaga Bauntung
- c. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Telaga Bauntung

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Kecamatan Telaga Bauntung merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Administrasi Kependudukan dan Pembinaan Keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.

3. Dasar Hukum

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan di bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

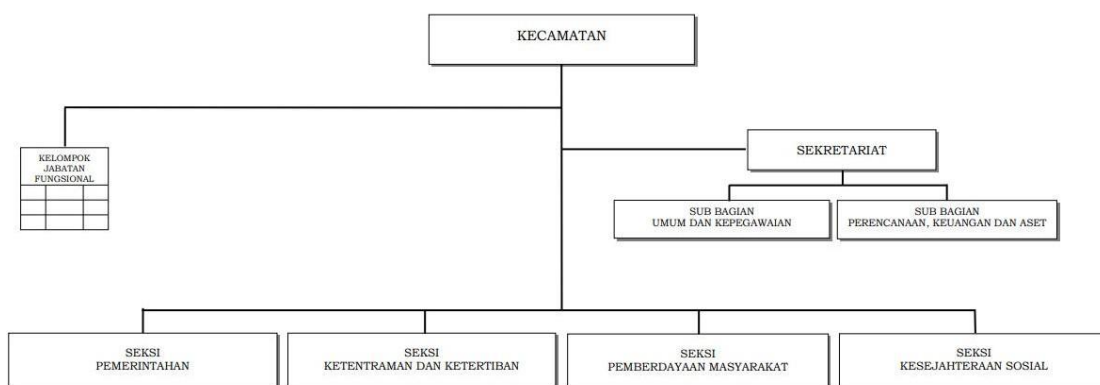
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar;
- f. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- h. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar;
- i. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah (Lembaran Darah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 25).
- j. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Kepala Seksi Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok Fungsional.

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Telaga Bauntung

5. Kepegawaian

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan

aparatus yang berkualitas

Tabel 1. 1 Data Kepegawaian Kecamatan Telaga Bauntung per 31 Desember 2024

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jml
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Camat			-	-							-				-
2	Sekretaris			1	1					1						1
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1	1						1				1
4	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat				1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				-		-							-		-
7	Kasubag Renc & Keu				1		1						1			1
8	Kasubag Umpeg				1		1					1				1
9	Pelaksana						1	1				1		1		2
10	Fungsional (P3K)					-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
11	Tenaga Honor/Kontrak										-	1	-	2	1	4
	Jumlah	-	-	1	5	1	6	1	-	1	-	7	1	3	1	13

Sumber: Data diolah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Telaga Bauntung

C. ISU STRATEGIS

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Telaga Bauntung yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan (2) dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "Cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Telaga Bauntung masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Permasalahan pada Kecamatan Telaga Bauntung

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan.

			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan
--	--	--	---

Sumber: Data diolah Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Kecamatan Telaga Bauntung

Kecamatan Telaga Bauntung secara terpadu, terarah dan berkesinambungan yang diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Telaga Bauntung sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui (*Focus Group Discussion*) FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Telaga Bauntung Telaga Bauntung adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

Kata Pengantar;

Ringkasan Eksekutif;

Daftar Isi;

Daftar Tabel;

Daftar Gambar;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas dan Fungsi (struktur organisasi), Isu Strategis serta Sistematika Penyajian;

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan Kesimpulan dan Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan Strategis

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun sub kegiatan Kecamatan. Adapun tujuan tersebut yaitu :
“Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik”.

Tujuan strategis terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik adalah untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi publik kepada masyarakat, dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas. Reformasi pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Tujuan strategis tersebut diukur melalui indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** berupa data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya

apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Telaga Bauntung mengampu urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dan Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, urusan dan program yang diampu Kecamatan Telaga Bauntung bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2021–2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang.

Visi misi periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, Agamis atau MANIS”**, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan K a b u p a t e n B a n j a r dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini:

a. MAJU

Penjelasan:

- a. Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.
- b. Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development*.

b. MANDIRI

Penjelasan:

- a. Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.
- b. Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.
- c. Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.

c. AGAMIS

Penjelasan:

Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 7 (tujuh) misi yaitu :

- a. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
- b. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan;
- c. Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
- d. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
- f. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur;
- g. Menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021 - 2026, secara umum Kecamatan Telaga Bauntung mendukung pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Telaga Bauntung berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dalam RPJMD 2021-2026 yakni **“Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif”**.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Kecamatan Telaga Bauntung sebanyak 1 (satu) indikator.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Sumber: SK IKU Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan (2) Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2024 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (Pohon Kinerja) mulai dari Eselon III dan Eselon IV sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	((Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi: 1. Aspek Administrasi; 2. Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 3. Aspek Pelayanan Publik; 4. Aspek Kesejahteraan Sosial; 5. Aspek Ketentraman dan Ketertiban; 6. Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan; 7. Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	79	Skor/ Nilai		2.581.189.967	Camat
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern Kecamatan Telaga Bauntung	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\sum (\text{Unsur Kinerja Utama} \times 40\%) + (\text{Unsur Kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	76	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.414.585.967	Sekretaris Camat
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Jumlah Keseluruhan Dokumen Perencana, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu dan Berkualitas: Total Jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.656.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset
4	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau Verifikasi Keuangan SKPD yang Disusun Tepat Waktu dan Tepat Mutu: jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.932.068.783	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam satu Tahun yang dilaksanakan : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.100.000	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
6.	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan: jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan: jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.060.528	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan: jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.918.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan: jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100%	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.611.456	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan: jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100%	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	133.671.200	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pemerintahan Daerah		
11	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang Terlaksana: Total jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.000.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan yang di laksanakan : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.000.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
13	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.400.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
14	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.150.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi	jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48.840.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
16	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100%	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.214.000	Kepala Seksi Pemerintahan
17	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 202

Dari tabel 2.2 diatas yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024 yang penetapannya dilakukan secara berjenjang (Pohon Kinerja), dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024 untuk Sasaran Strategis diampu oleh Camat, tingkat Program diampu oleh Sekretaris Camat dan Kepala Seksi (Kepala Seksi di Kecamatan) dan untuk tingkat kegiatan diampu oleh Kepala Sub Bagian (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), Kepala Seksi (Kepala Seksi di Kecamatan).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berupa data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat

Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung mencapai nilai 84,83 dari target 86 atau tercapai 98,64% dan mendapat kriteria mutu pelayanan “Baik”. Hasil tersebut diperoleh dari akumulasi nilai 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan hasil kuisioner dari responden sebanyak 100 orang.

Nilai atau skor Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan Data Profil Kecamatan Telaga Bauntung, Skor Indeks Kepuasan Masyarakat selama kurun waktu 3 tahun dari 2022-2024 mengalami peningkatan 1,16%. dimana dari Nilai IKM tahun 2022 sebesar 83,86 naik menjadi 84,83 di tahun 2024.

Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kecamatan Telaga Bauntung untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih baik lagi sehingga cita-cita reformasi pelayanan publik untuk menjadikan sistem pelayanan lebih efisien, akuntabel, transparan, responsif, dan adil dapat terwujud. Tentunya Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kecamatan Telaga Bauntung.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah Perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk perjanjian kinerja telah dimuat dalam BAB II mengenai rencana kinerja tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2024 yang telah disepakati.

Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86/2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Telaga Bauntung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Telaga Bauntung beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	79	Nilai	94.38	119.47	Sangat Tinggi
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Indeks	72.54	95.45	Sangat Tinggi
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
4	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi

5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
11	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
13	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
14	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
15	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
16	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi

		Kepala Daerah yang Terfasilitasi					
17	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Telaga Bauntung Tahun 2024



Gambar 3.1 Diagram Capaian Sasaran Kinerja

Penjelasan Tabel:

1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan merupakan Sasaran Strategis Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024, dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target 79, realisasi 94,38 dengan nilai capaian 119,47% Kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Dalam rangka mendukung kinerja sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan guna mempersiapkan pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja kecamatan dimana terdapat beberapa indikator yang menjadi target penilaian Evaluasi Kecamatan, meliputi:
 - Aspek administrasi
 - Aspek pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Aspek pelayanan publik

- Aspek kesejahteraan sosial
- Aspek ketentraman dan ketertiban
- Aspek pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan
- Aspek pemberdayaan masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan triwulan IV tahun 2024, meliputi:

- pengumpulan dan pengecekan kembali terkait bahan dan data dukung seluruh aspek;
- koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- pelaksanaan rapat koordinasi internal pembagian tugas dalam rangka persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan.

2. Sasaran kinerja Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian dengan Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung, sasaran ini merupakan sasaran kinerja Sekretaris Camat, dengan target 76 realisasi 72,54 dengan nilai capaian 95,45%, Kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Dalam rangka persiapan penilaian dimana Penilaian Mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dilakukan terhadap unsur Kinerja Utama, Kepatuhan dan Kinerja Pelayanan Publik, meliputi:

1. Kinerja Utama
 - a. sasaran strategis;
 - b. strategi dan pencapaian Kinerja; dan
 - c. pelaporan Kinerja.
2. Kepatuhan
 - a. proses bisnis dan tata laksana;
 - b. tata kelola pengadaan barang dan jasa;
 - c. implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d. keandalan laporan keuangan;
 - e. pengelolaan dan pengamanan aset;

- f. efektivitas pengendalian korupsi; dan
 - g. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Kinerja Pelayanan publik
- a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - b. inovasi pelayanan publik;
 - c. keterbukaan informasi publik;
 - d. standar pelayanan publik; dan
 - e. pelayanan pengaduan.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung kinerja sasaran ini antara lain:

- Penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur kinerja utama, meliputi:
 - a) Data renstra
 - b) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - c) Rencana Aksi Tahun 2024
 - d) Keputusan Camat tentang Penetapan IKU Kecamatan Telaga Bauntung
 - e) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III
 - f) DPA
 - g) Dokumen Laporan bendahara pengeluaran
 - h) RKBMD
- Penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur Kepatuhan, meliputi:
 - a) Anjab ABK dan Peta Jabatan
 - b) Dokumen informasi Kepegawaian
 - c) Kode Etik
- Penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur Inovasi Pelayanan Publik, meliputi:
 - a) Penyiapan bahan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
 - b) Data Inovasi Kecamatan Telaga Bauntung
 - c) Data laporan pelayanan

d) SKM

e) Pengelolaan website kecamatan Telaga Bauntung.

- Melaksanakan rapat internal Kecamatan dalam rangka pembagian tugas dan penyiapan data dukung penilaian IKKI Kecamatan Telaga Bauntung.

Faktor Pendukung:

- *Terdapat sumber daya manusia yang memahami tentang strategi pengendalian internal pada Kecamatan Telaga Bauntung.*
- *Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.*

Faktor Penghambat:

- *Bahan dan data dukung belum terhimpun secara sistematis*
- *Belum ada informasi yang jelas terkait waktu pelaksanaan penilaian*
- *Minimnya jumlah sumber daya manusia di Kecamatan.*

3. Sasaran Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kinerja Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Penyusunan Rencana Aksi
2. Penyusunan Tabel Keselarasan
3. Penyusunan dokumen Renja Tahun 2025
4. Penyusunan dokumen Renja Perubahan Tahun 2024
5. Penyusunan Rencana Aksi Perubahan Tahun 2024
6. Penyusunan Tabel Keselarasan Perubahan Tahun 2024
7. Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2025
8. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2025
9. Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Tahun 2024

10. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Tahun 2024
11. Penyusunan Dokumen DPA Tahun 2025
12. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Tahun 2025
13. Penyusunan Dokumen DPA Perubahan Tahun 2024
14. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perubahan Tahun 2024
15. Penyusunan Dokumen LKJIP tahun 2023
16. Laporan RFK bulan Januari tahun 2024
17. Laporan RFK bulan Februari tahun 2024
18. Laporan RFK bulan Maret tahun 2024
19. Laporan RFK bulan April tahun 2024
20. Laporan RFK bulan Mei tahun 2024
21. Laporan RFK bulan Juni tahun 2024
22. Laporan RFK bulan Juli tahun 2024
23. Laporan RFK bulan Agustus tahun 2024
24. Laporan RFK bulan September tahun 2024
25. Laporan RFK bulan Oktober tahun 2024
26. Laporan RFK bulan November tahun 2024
27. Laporan RFK bulan Desember tahun 2024
28. Laporan kinerja triwulan I Tahun 2024
29. Laporan kinerja triwulan II Tahun 2024
30. Laporan kinerja triwulan III Tahun 2024
31. Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2024
32. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024

Dari sebanyak 32 target Kegiatan dalam rangka mendukung Sasaran Kinerja Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 telah tercapai 32 kegiatan dengan data sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Aksi
2. Penyusunan Tabel Keselarasan
3. Penyusunan dokumen Renja Tahun 2025

4. Penyusunan dokumen Renja Perubahan Tahun 2024
5. Penyusunan Rencana Aksi Perubahan Tahun 2024
6. Penyusunan Tabel Keselarasan Perubahan Tahun 2024
7. Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2025
8. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2025
9. Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Tahun 2024
10. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Tahun 2024
11. Penyusunan Dokumen DPA Tahun 2025
12. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Tahun 2025
13. Penyusunan Dokumen DPA Perubahan Tahun 2024
14. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perubahan Tahun 2024
15. Penyusunan Dokumen LKJIP tahun 2023
16. Laporan RFK bulan Januari tahun 2024
17. Laporan RFK bulan Februari tahun 2024
18. Laporan RFK bulan Maret tahun 2024
19. Laporan RFK bulan April tahun 2024
20. Laporan RFK bulan Mei tahun 2024
21. Laporan RFK bulan Juni tahun 2024
22. Laporan RFK bulan Juli tahun 2024
23. Laporan RFK bulan Agustus tahun 2024
24. Laporan RFK bulan September tahun 2024
25. Laporan RFK bulan Oktober tahun 2024
26. Laporan RFK bulan November tahun 2024
27. Laporan RFK bulan Desember tahun 2024
28. Laporan kinerja triwulan I Tahun 2024
29. Laporan kinerja triwulan II Tahun 2024
30. Laporan kinerja triwulan III Tahun 2024
31. Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2024
32. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024

Sehingga realisasi/capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD Tahun 2024 sebesar **100%** didapatkan dari perhitungan jumlah

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang terlaksana dibagi jumlah target penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikali seratus.

Untuk lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana}}{\text{jumlah target penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah}} \times \frac{100}{100}$$

Sehingga didapatkan data sebagai berikut:

$$\frac{32}{32} \times 100 = 100\%$$

Faktor Pendukung:

- *Komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.*
- *Adanya dukungan dan arahan dari pimpinan.*

Faktor Penghambat:

- *Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan*
- *Minimnya kuantitas sumber daya manusia di Kecamatan.*

4. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas yang terselenggara dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung sasaran Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah antara lain:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (13 orang)
- Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (40 Dokumen)
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023.

Faktor Pendukung:

- *Kerjasama yang baik dari seluruh pegawai lingkup kecamatan dalam penyusunan Laporan baik bulanan maupun triwulanan*

Faktor Penghambat:

- *Jaringan / sistem aplikasi yang sering bermasalah (simondalev)*
- *spesifikasi laptop yang masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kecepatan penginputan.*
- *Seringnya pemadaman listrik sehingga mengganggu dalam pekerjaan.*

5. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun dan yang terselenggara dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kinerja Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebanyak 5 (lima) kegiatan yang telah terlaksana, yaitu:

- pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan I
- pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan II
- pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan III
- pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan IV
- pelaksanaan RKBMD Tahun 2024

Sehingga didapatkan data sebagai berikut:

$$\frac{5}{5} \times \frac{100}{100} = 100\%$$

Faktor Pendukung:

- *Kerjasama yang baik di lingkungan internal kecamatan*
- *Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait*

Faktor Penghambat:

- *Data laporan tahun-tahun sebelumnya belum terhimpun secara sistematis.*
- *Kurangnya SDM yang dapat membantu dalam menghimpun data laporan.*

6. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi dan yang terselenggara dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kinerja Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) kegiatan yang telah terlaksana, yaitu

- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai per Triwulan.
- Bimbingan Teknis Kepegawaian.

Faktor Pendukung:

- *Kerjasama yang baik di lingkungan internal kecamatan*
- *Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait*

Faktor Penghambat:

- *Seringnya pemadaman listrik sehingga mengganggu dalam pekerjaan.*
- *Kurangnya SDM yang dapat membantu dalam menghimpun data laporan.*

7. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja kegiatan yang telah terlaksana, antara lain:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1 Paket)
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1 Paket)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1 Paket)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket)
- Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu (1 laporan)
- Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 laporan)

Faktor Pendukung:

- *Kerjasama yang baik di lingkungan internal kecamatan*
- *Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait*

Faktor Penghambat:

- *Tamu yang datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu*
- *Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.*

8. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terselenggara dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini yaitu pengadaan mebel (sofa) 1 unit, penyediaan Peralatan dan mesin berupa lemari arsip 1 unit, kipas angin 3 unit, AC 1 unit, Laptop sebanyak 3 unit. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya berupa rehap kamar rumah dinas 1 unit.

Faktor Pendukung:

- *Kerjasama dan komunikasi yang baik antar pihak.*

Faktor Penghambat:

- *Perbedaan harga barang di pasaran dengan DPA.*

9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

- penyediaan Jasa Surat Menyurat (12 laporan)
- penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 laporan)
- penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (12 laporan)

Faktor Pendukung:

- *Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait*

Faktor Penghambat:

- *Data surat menyurat belum terhimpun secara sistematis.*

10. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terselenggara dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini, yaitu:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (14 unit)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (10 unit)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (3 unit)

Faktor Pendukung:

- *Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait*

Faktor Penghambat:

- *Data aset kecamatan yang belum terhimpun dengan baik dan teratur*
- *Penyedia layanan service AC yang jauh dari kantor kecamatan*
- *Data pajak kendaraan bermotor belum terhimpun dengan baik*
- *SDM Kecamatan yang masih minim baik dari segi kualitas maupun kuantitas*

11. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kegiatan puskesmas dan pelayanan publik/paten).

Faktor Pendukung:

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.*

Faktor Penghambat:

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.

12. Sasaran Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini antara lain:

- Penyelenggaraan kegiatan MTQ pada tanggal 24 s.d. 27 Juli 2024
- Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan pada bulan September 2024
- Penyelenggaraan kegiatan Safari Ramadhan pada bulan Maret 2024

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Faktor Pendukung:

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.*

Faktor Penghambat:

- Keterlibatan unsur masyarakat dalam kegiatan kesejahteraan sosial masih belum optimal
- Kurangnya SDM Kecamatan yang menangani bidang Kesejahteraan Sosial

13. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan mendukung sasaran kinerja ini antara lain:

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Kegiatan Pra Musrenbang terlaksana pada bulan Januari 2024
 - Kegiatan Musrenbang terlaksana pada bulan Februari 2024
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Rakor rutin PKK terlaksana setiap 2/3 bulan sekali
 - Kegiatan Profil Desa terlaksana pada bulan maret 2024
 - Kegiatan Pokjanal Posyandu langsung di limpahkan ke desa

Faktor Pendukung:

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.*

Faktor Penghambat:

- *Belum optimalnya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan*
- *Kurangnya SDM Kecamatan yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat*

14. Sasaran Kinerja Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini antara lain:

- Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yaitu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Ketenteraman dan Ketertiban Bagi Linmas Desa berupa melaksanakan rakor trantib, pelatihan linmas desa, memfasilitasi posko pileg/pilpres dan pilkada.
- Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yaitu pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:
 - pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang peran Linmas Desa dalam keamanan dan ketertiban Desa.

Faktor Pendukung:

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.*
- *Adanya arahan dan dukungan dari pimpinan*

Faktor Penghambat:

- *Jumlah sdm kecamatan yang masih minim sehingga penataan administrasi seksi ketenteraman dan ketertiban masih belum optimal.*

15. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terasilitasi yang memiliki target 100% dan realisasi 100% dengan capaian sebesar 100% dan kriteria capaian Sangat Tinggi. Kegiatan yang mendukung Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yaitu:

- Sosialisasi Peraturan Bupati (PERBUP).
- Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA).

Faktor Pendukung:

- *Adanya regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan*
- *Adanya arahan dan dukungan dari pimpinan*
- *Tersedianya anggaran kegiatan*

Faktor Penghambat:

- *Jumlah sdm kecamatan yang masih minim sehingga penataan administrasi seksi Pemerintahan masih belum optimal.*
- *Kurangnya koordinasi lintas sektor*

16. Sasaran Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini antara lain:

- Penyelenggaraan Rakor Forkopimcam setiap 2 bulan sekali pada Tahun 2024
- Peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2024

Faktor Pendukung:

- *Adanya regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan*
- *Adanya arahan dan dukungan dari pimpinan*
- *Tersedianya anggaran kegiatan*

Faktor Penghambat:

- *Jumlah sdm kecamatan yang masih minim sehingga penataan administrasi seksi Pemerintahan masih belum optimal.*
- *Kurangnya koordinasi lintas sektor*

17. Sasaran Kinerja Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini antara lain:

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Faktor Pendukung:

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.*
- *Adanya arahan dan dukungan dari pimpinan*

Faktor Penghambat:

- Jumlah sdm kecamatan yang masih minim sehingga penataan administrasi seksi Pemerintahan masih belum optimal.
- kurangnya sdm yg mumpuni dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Telaga Bauntung sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/*trend* meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	94,38	119,47%	67,47	92,42%	76,72	109,9%	
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks	72,54	94,45%	71,96	97,24%	59,25	81%	
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
4	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	

5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
11	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
13	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
14	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	

15	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
16	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	
17	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100%	100	100%	100	100%	

a. Keterangan/penjelasan tentang perbandingan realisasi capaian kinerja:

Berdasarkan data pada tabel 3.3 tentang Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi/capaian pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2022 yaitu sebesar 76,72, capaian tahun 2023 yaitu sebesar 67.47 dan capaian tahun 2024 sebesar 94,38, Kinerja sasaran ini mengalami ada penurunan dari tahun 2023 dan selanjutnya peningkatan pesat dari tahun 2023 ke tahun 2024 Kecamatan Telaga Bauntung berhasil meningkatkan kinerjanya dibuktikan dengan adanya peningkatan pada capaian sasaran Evaluasi Kinerja Kecamatan dari tahun 2022 sebesar 109 dan tahun 2023 sebesar 92, menjadi 119 di tahun 2024 dengan predikat Sangat Tinggi.
2. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung untuk tahun 2022 sebesar 59,25 dan tahun 2023 sebesar 71,96 sedangkan tahun 2024 sebesar 72,54.

Nilai IKKI mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun Kecamatan Telaga Bauntung berhasil meningkatkan kinerjanya .

3. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang terselenggara pada tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100%, tahun 2023 sebesar 100% dan Tahun 2022 sebesar 100%.
4. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
5. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terselenggara pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
6. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian yang terselenggara pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
7. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
8. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terselenggara pada tahun 2024 sebesar 100%,

realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.

9. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
10. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terselenggara pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
11. Realisasi/capaian kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
12. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
13. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar

100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.

14. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
15. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
16. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.
17. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang terlaksana pada tahun 2024 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 100%.

3. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja Sasaran Tahun Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2024 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2024, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Telaga Bauntung selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	94.38	85	117%
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks	72.54	80	94%
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persen	100%	100%	100%
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen	100%	100%	100%
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100%	100%	100%
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%
8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Persen	100%	100%	100%

9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	100%	100%
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%
11	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100%	100%	100%
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100%	100%	100%
13	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100%	100%	100%
14	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100%	100%	100%
15	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100%	100%	100%
16	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100%	100%	100%
17	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100%	100%	100%

Sumber: Matriks Renstra Perubahan (2) Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2021-2026

a. Keterangan dan penjeleasan tentang Realisasi Kinerja:

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir Renstra Tahun 2021-2026 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** dengan indikator **Nilai Evaluasi Kecamatan** dengan realisasi 94,38 Nilai sudah melebihi target akhir periode Renstra yakni 85 Nilai dengan persentase Capaian

Periode Akhir Renstra sebesar 117%.

- 2) Sasaran Strategis **Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian** dengan indikator **Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung** dengan realisasi 72,54 Indeks belum melebihi target akhir periode Renstra yakni 80 Indeks dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 94 %.
- 3) Sasaran Strategis **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas** dengan indikator **Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 4) Sasaran Strategis **Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas** dengan indikator **Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 5) Sasaran Strategis **Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas** dengan indikator **Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 6) Sasaran Strategis **Lancarnya administrasi kepegawaian daerah** dengan indikator **Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 7) Sasaran Strategis **Terselenggaranya kegiatan kantor** dengan indikator **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 8) Sasaran Strategis **Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan** dengan indikator **Persentase Pengadaan**

- Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 9) Sasaran Strategis **Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor** dengan indikator **Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 10) Sasaran Strategis **Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan** dengan indikator **Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 11) Sasaran Strategis **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** dengan indikator **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 12) Sasaran Strategis **Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** dengan indikator **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 13) Sasaran Strategis **Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan indikator **Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- 14) Sasaran Strategis **Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** dengan

indikator **Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.

- 15) Sasaran Strategis **Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** dengan indikator **Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi**

dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.

- 16) Sasaran Strategis **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan indikator **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.

- 17) Sasaran Strategis **Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan indikator **Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.

4. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Provinsi/Nasional

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan Provinsi/Nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Provinsi/Nasional. Berkaitan dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 belum dapat di sandingkan dengan Target Provinsi dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible mengenai target Provinsi maupun Nasional tersebut.

5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis/Kinerja

Pada tahun 2024 berdasarkan Renstra Perubahan (2) Tahun 2021-2026 ditetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** dengan indikator kinerja **Nilai Evaluasi Kecamatan**. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan melalui Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan, terdapat Indikator Kinerja dengan capaian **Sangat Tinggi**. Pencapaian Indikator Kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 5 Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Evaluasi Kecamatan	79	Nilai	94.38	119.47	Camat
2	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Indeks	72.54	95.45	Sekcam
3	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	100	100	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
4	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	100	Persen	100	100	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
5	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persen	100	100	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset
6	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100	Persen	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian

10	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	100	100	Kasi Kesejahteraan Sosial
12	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	100	100	Kasi Kesejahteraan Sosial
13	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Persen	100	100	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
14	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	100	100	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum
15	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi	100	Persen	100	100	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
16	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	100	Persen	100	100	Kasi Pemerintahan
17	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	100	100	Kasi Pemerintahan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Telaga Bauntung

a. Faktor Pendorong/Faktor Penghambat Sasaran:

- 1) Sasaran Strategis **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** dengan indikator **Nilai Evaluasi Kecamatan** yang memiliki target **Nilai 79** dan realisasi **Nilai 94,38** dengan capaian sebesar **119.47%** yang diampu oleh **Camat**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:
 - a) Arahan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
 - b) Kerjasama tim Sekretariat dan Kepala Seksi di Kecamatan Telaga Bauntung yang solid dalam pengumpulan berkas untuk

penilaian Nilai Evaluasi Kecamatan.

- c) Bimbingan dari dinas - dinas terkait.
- d) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

- 2) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian** dengan indikator **Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung** yang memiliki target **Indeks 76** dan realisasi **Indeks 72.54** dengan capaian sebesar **95.45%** yang diampu oleh **Sekretaris Kecamatan**.

Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:

- a) Arahan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
 - b) Kerjasama tim Sekretariat di Kecamatan Telaga Bauntung yang solid dalam pengumpulan berkas untuk pemenuhan Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung.
 - c) Bimbingan dari dinas - dinas terkait.
- 3) Sasaran Kinerja **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas** dengan indikator **Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:
- a) Arahan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
 - b) Kerjasama tim Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset yang solid.
 - c) Bimbingan dari Bidang PPM Bappedalitbang.
- 4) Sasaran Kinerja **Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas** dengan indikator **Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Sub Bagian**

Perencanaan, Keuangan dan Aset. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:

- a) Arahkan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
- b) Kerjasama tim Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset yang solid.
- c) Bimbingan dari Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPAD.

5) Sasaran Kinerja **Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas** dengan indikator **Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun yang memiliki target 100% dan realisasi 100% dengan capaian sebesar 100% yang diampu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.** Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:

- a) Arahkan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
- b) Kerjasama tim Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset yang solid.
- c) Bimbingan dari Bidang Aset BPKPAD.

6) Sasaran Kinerja **Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah** dengan indikator **Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.** Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:

- a) Arahkan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
- b) Kerjasama tim Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang solid.
- c) Bimbingan dari BKPSDM.

7) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Kegiatan Kantor** dengan indikator **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.** Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang

tercapai yaitu:

- a) Arahan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
 - b) Kerjasama tim Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang solid.
 - c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
 - d) Didukung oleh anggaran yang telah direncanakan.
- 8) Sasaran Kinerja **Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan** dengan indikator **Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:
- a) Arahan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
 - b) Kerjasama tim Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang solid.
 - c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
 - d) Didukung oleh anggaran yang telah direncanakan.
- 9) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor** dengan indikator **Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:
- a) Arahan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
 - b) Kerjasama tim Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang solid.
 - c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
 - d) Didukung oleh anggaran yang telah direncanakan.
- 10) Sasaran Kinerja **Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan** dengan indikator **Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:
- a) Arahan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.

- b) Kerjasama tim Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang solid.
 - c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
 - d) Didukung oleh anggaran yang telah direncanakan.
- 11) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** dengan indikator **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:
- a) Arahkan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
 - b) Kerjasama tim Seksi Kesejahteraan Sosial yang solid.
 - c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
 - d) Terbangunnya aksi kolaborasi lintas sektor di Kecamatan Telaga Bauntung.
 - e) Rencana tindak lanjut intervensi pencegahan stunting sudah tersusun dalam roadmap pencegahan dan penurunan stunting TPPS Kecamatan Telaga Bauntung.
- 12) Sasaran Kinerja **Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** dengan indikator **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:
- a) Arahkan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
 - b) Kerjasama tim Seksi Kesejahteraan Sosial yang solid.
 - c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
 - d) Terbangunnya aksi kolaborasi lintas sektor di Kecamatan Telaga Bauntung.
 - e) Rencana tindak lanjut intervensi pencegahan stunting sudah

tersusun dalam roadmap pencegahan dan penurunan stunting TPPS Kecamatan Telaga Bauntung.

- 13) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan indikator **Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** yang memiliki target 100% dan realisasi 100% dengan capaian sebesar 100% yang diampu oleh **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:
- a) Arahan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
 - b) Kerjasama tim Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang solid.
 - c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
 - d) Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang telah selesai dilaksanakan
- 14) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** dengan indikator **Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:
- a) Arahan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan
 - b) Kerjasama tim Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang solid.
 - c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
 - d) Terbangunnya aksi kolaborasi lintas sektor diKecamatan Telaga Bauntung.
 - e) Kegiatan sinergitas untuk pelaksanaan Pilgub dan Pilkada telah selesai dilaksanakan.
 - f) Kerjasama yang baik dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat.
- 15) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** dengan indikator **Persentase Koordinasi Penerapan dan**

Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:

- a) Arahkan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
- b) Kerjasama tim Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang solid.
- c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
- d) Terbangunnya aksi kolaborasi lintas sektor di Kecamatan Telaga Bauntung

16) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan indikator **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Seksi Pemerintahan**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:

- a) Arahkan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
- b) Kerjasama tim Seksi Pemerintahan yang solid.
- c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
- d) Terbangunnya aksi kolaborasi lintas sektor di Kecamatan Telaga Bauntung.

17) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan indikator **Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** yang memiliki target **100%** dan realisasi **100%** dengan capaian sebesar **100%** yang diampu oleh **Kepala Seksi Pemerintahan**. Faktor Pendorong keberhasilan indikator kinerja yang tercapai yaitu:

- a) Arahkan dari Camat dan Sekretaris Kecamatan.
- b) Kerjasama tim Seksi Pemerintahan yang solid.
- c) Bimbingan dari dinas-dinas terkait.
- d) Terbangunnya aksi kolaborasi lintas sektor di Kecamatan Telaga Bauntung.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** sudah tentu ada faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang dijalankan sehingga tercapai tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kecamatan Telaga Bauntung, dari analisa yang dilakukan di pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung dapat disimpulkan faktor–faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut, yaitu:

1) Faktor Pendukung Pelayanan

- a) Faktor kesadaran aparatur Kecamatan Telaga Bauntung
Kesadaran dan disiplin serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang dimiliki oleh setiap aparatur/petugas pelayanan di Kecamatan Telaga Bauntung sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan.
- b) Faktor Aturan (SOP) yang digunakan Kecamatan Telaga Bauntung
Pemahaman aparatur/petugas pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung yang cukup baik terhadap standar operasional pelayanan (SOP) yang dijalankan sehingga menghasilkan pelayanan yang baik, bersih dan amanah.
- c) Faktor organisasi/SKPD Kecamatan Telaga Bauntung
Petugas pelayanan dan apartur Kecamatan Telaga Bauntung sudah memahami cukup baik terhadap tugas dan tanggung jawab serta adanya kerjasama yang baik antar bidang/seksi sehingga dapat menciptakan pelayanan yang terbaik.
- d) Faktor kemampuan dan SDM Kecamatan Telaga Bauntung
Aparatur/petugas pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung walaupun jumlahnya belum memadai namun memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada

masyarakat .

2) Faktor Penghambat Pelayanan

- a) **Faktor kualitas sumber daya aparatur/petugas** pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung Masih rendahnya kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Telaga Bauntung sehingga tidak terjalin komunikasi yang lancar sehingga menyebabkan pelayanan terhambat dan terlambat.
- b) **Faktor sarana dan prasarana** yang dimiliki Kecamatan Telaga Bauntung Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Telaga Bauntung juga sangat mempengaruhi proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- c) **Faktor Eksternal** Pengguna layanan yang datang ke Pelayanan Kecamatan masih banyak yang belum memahami ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam SOP, sehingga menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan terhambat.

3) Upaya Perbaikan Pelayanan

- a) Faktor kualitas sumber daya aparatur/petugas pelayanan Kecamatan Telaga Bauntung memperbaiki sistem layanan dengan layanan terpadu 1 (satu) pintu dengan berbasis aplikasi.
- b) Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) telah melengkapi sarana dan prasarana berupa 1 (satu) buah PC/Unit Komputer sebagai langkah untuk peningkatan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
- c) Terus menerus melakukan perbaikan sarana dan prasarana dengan anggaran yang secukupnya dan juga merapikan administrasi.
- d) Membuat aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen pengukur terhadap keberhasilan layanan kepada masyarakat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Dari 17 (Tujuh Belas) indikator kinerja yang secara keseluruhan menunjukkan pencapaian yang sampai dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik. dan lebih jauh juga tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik. yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (≥ 100 %)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	119.47	77,84	41,63
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	85,76%	14,24
3	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	100	74.78	25.22
4	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	83,52	16,48
5	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	0
6	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	94,03	5,97
7	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100	100	0
8	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	62,64	37,36

9	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	94,20	5,80
10	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	0
11	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	92,31	7,69
12	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	82,87	17,13
13	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	87,0	13,0
14	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	99,18	0,82
15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	97,10	2,90
16	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	0

Sumber : SIMONDALEV Kecamatan Telaga Bauntung 2024

a. Keterangan/penjelasan tentang Analisis Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan data pada tabel 3.6 tentang Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** dengan indikator kinerja **Nilai Evaluasi Kecamatan**, memiliki capaian kinerja sebesar **119,47%** dan penyerapan anggaran sebesar **77,84%** dari total anggaran yang telah disediakan.

- 2) Sasaran Kinerja **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas** dengan indikator kinerja **Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **85,76%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 3) Sasaran Kinerja **Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas** dengan indikator kinerja **Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **74,78%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 4) Sasaran Kinerja **Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas** dengan indikator kinerja **Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **83,52%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 5) Sasaran Kinerja **Lancarnya administrasi kepegawaian daerah** dengan indikator kinerja **Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **100%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 6) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya kegiatan kantor** dengan indikator kinerja **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **94,03%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 7) Sasaran Kinerja **Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan** dengan indikator kinerja **Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **100%** dari total anggaran yang telah disediakan.

- 8) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor** dengan indikator kinerja **Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **62,64%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 9) Sasaran Kinerja **Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan** dengan indikator kinerja **Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **94,20%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 10) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** dengan indikator kinerja **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **100%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 11) Sasaran Kinerja **Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** dengan indikator kinerja **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **92,31%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 12) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan indikator kinerja **Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **82,87%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 13) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** dengan indikator kinerja **Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**, memiliki capaian kinerja sebesar

100% dan penyerapan anggaran sebesar **87%** dari total anggaran yang telah disediakan.

- 14) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** dengan indikator kinerja **Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **99,18%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 15) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan indikator kinerja **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **97,10%** dari total anggaran yang telah disediakan.
- 16) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan indikator kinerja **Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, memiliki capaian kinerja sebesar **100%** dan penyerapan anggaran sebesar **100%** dari total anggaran yang telah disediakan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis **Nilai Evaluasi Kecamatan** Tahun 2024 dengan target nilai sebesar 79, realisasi indikator kinerja Sasaran Strategis **Nilai Evaluasi Kecamatan** sebesar **94,38**, sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar **119,47%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**, jika di bandingkan dengan tahun 2023 di mana realisasi indikator kinerja Sasaran Strategis **Nilai Evaluasi Kecamatan** sebesar nilai **67,47** dari target **77**, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Keberhasilan dalam mencapai sasaran merupakan tujuan akhir dari setiap sasaran ataupun program/kegiatan.

Namun, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang umumnya berperan dalam pencapaian Sasaran Strategis:

a. Kepemimpinan yang kuat oleh Camat

Kepemimpinan yang visioner, inspiratif, dan mampu memotivasi tim adalah salah satu kunci yang menunjang keberhasilan sasaran di Kecamatan Telaga Bauntung.

b. Sumber daya yang memadai

Tersedianya sumber daya yang cukup, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun teknologi, sangat penting untuk mendukung keberhasilan sasaran tersebut.

c. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif antara pimpinan Kecamatan dan Sub Bagian/Seksi Kecamatan sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang memahami dan berkomitmen terhadap sasaran strategis.

d. Monitoring dan Evaluasi secara rutin

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja baik program, kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian kinerja secara keseluruhan yang harus dilakukan agar bisa mengetahui perkembangan pelaksanaan kinerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan solusi.

- Tahun 2024 ini target sasaran kinerja berhasil tercapai seluruhnya. Keberhasilan pencapaian sasaran didukung oleh adanya program dan kegiatan yang sinergis sehingga benar-benar efektif dalam mensupport pencapaian target kinerja sasaran.

1) Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan

Program yang mendukung Keberhasilan pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan ini adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat, 2) Kegiatan Adminsitasi keuangan Perangkat Daerah. 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, melalui kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, melalui kegiatan 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan 2) kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Aktifitas dari program dan kegiatan tersebut yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain

- Penguatan administrasi berupa penyusunan monografi, update database kepegawaian, melengkapi buku-buku administrasi dan peningkatan tatakelola administrasi kepegawaian dan kearsipan, update KIB dan KIR, update data aparat kelurahan dan desa
- Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang baik, terarah dan menjaga konsistensi atau keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya.
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan
- Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa
- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
- Pendataan organisasi sosial kemasyarakatan dan update data keluarga miskin
- Pendataan Linmas dan pembinaan serta dialog dengan FKUB
- Penguatan Forkopincam dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- Fasilitasi musrenbang desa dan kecamatan, fasilitasi penyusunan RKP desa, pembinaan APBDes.

2) Sasaran Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Program yang mendukung keberhasilan kinerja adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, melalui sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 3) Sasaran Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat dengan sub kegiatan 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Aktivitas dari kegiatan dan sub kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja

a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan

Penyusunan dokumen perencanaan ditargetkan sebanyak 13 dokumen dimana semua dokumen perencanaan yang ditargetkan tersebut seluruhnya sudah terlaksana dengan baik.

Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen Rencana kerja, IKU,, Penyusunan Renstra perubahan Kedua, Penyusunan Rencana Aksi, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan RKA, KAK, ROPK, Probis, SOP, SPIP.

b. Melaksanakan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja yang dilaksanakan meliputi monitoring evaluasi berjenjang, monitoring dan evaluasi Renja, Rencana Aksi dan menyusun laporan kinerja triwulan, tahunan (LKJIP), pelaporan bulanan simondalev, pelaporan evaluasi SPIP

4) Sasaran Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas

Keberhasilan sasaran didukung oleh adanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui sub kegiatan 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dan 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Aktivitas dari kegiatan dan sub kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja

a. Melaksanakan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan

target 13 orang/bulan terealisasinya seluruhnya sebesar 100 persen

Proses pencairan gaji dan TPP selama tahun 2024 berjalan dengan lancar terutama pencairan TPP ini dimana harus memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi oleh SKPD seperti absensi, aktifitas, laporan RFK, laporan PBJ, input emonev yang rutin diminta setiap bulan dan persyaratan berkala seperti laporan kinerja dan LKJIP.

- b. Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan tercapai 100 persen dari target 40 dokumen terealisasinya seluruhnya. Proses penatausahaan/verifikasi keuangan berjalan dengan lancar mulai dari proses permintaan uang persediaan, LS, GU, pertanggungjawaban keuangan dan lain-lainnya semuanya berjalan dengan baik.

Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 laporan sesuai target yang ditetapkan.

- 5) Sasaran Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Aktifitas dari kegiatan dan sub kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja

- a. Menyediakan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dan merencanakan barang yang akan di perlukan untuk menunjang kegiatan di kantor kecamatan.

- b. Menyediakan Laporan Penatausahaan Barang Milik dan pencatatan barang dan penghapusan barang yang tidak layak di pakai.

6) Sasaran Lancarnya administrasi kepegawaian daerah.

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7) Sasaran Terselenggaranya kegiatan kantor

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran adalah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 5) Fasilitas Kunjungan Tamu dan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Aktivitas dari kegiatan dan sub kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja

- a. Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 (satu) paket. Adanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ini mendukung pelayanan administrasi perkantoran. Dengan adanya komponen instalasi listrik yang lengkap, pelayanan perkantoran dapat berjalan dengan baik.
- b. Menyediakan peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket untuk memenuhi kebutuhan kantor berupa alat kebersihan dan sarana lainnya sehingga diharapkan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan pada Kantor Kecamatan Telaga Bauntung.

- c. Menyediakan Bahan Logistik kantor, seperti Kertas (HVS, kertas warna, sticky notes), Pulpen, pensil, penghapus, Penggaris, stapler, isi staples, Lem, gunting, lakban, Binder, map, ordner guna untuk menunjang urusan kantor.
 - d. Menyediakan cetak dan penggandaan sebanyak 1 paket sesuai target untuk memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di suatu instansi sebagai penunjang kelancaran kegiatan administrasi perkantoran. Barang cetakan yang dihasilkan dari penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah Map kop Kecamatan, spanduk dan lain-lain
 - e. Memfasilitas para kunjungan tamu yang berkunjung ke Kecamatan Telaga Bauntung. Fasilitas ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi atau menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke Kecamatan Telaga Bauntung. Tamu-tamu yang berkunjung bukan hanya dari dinas atau instansi terkait tetapi ada beberapa kali kunjungan mahasiswa universitas dari Kalimantan selatan
 - f. Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam maupun di luar daerah. Sepanjang tahun 2024 banyak sekali undangan-undangan yang harus dihadiri dan diikuti oleh aparatur kecamatan Kertak Hanyar diantaranya menghadiri rapat koordinasi ke kabupaten, provinsi maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi atau bimtek.
- 8) Sasaran kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan.

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Aktifitas sub kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian sasaran yaitu:

- a. Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Pengadaan AC, Sopa, Kipas Angin, Lemari Arsif, dan Lain-lain guna menunjang aktifitas perkantoran.

9) Sasaran Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor.

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan 1) Penyediaan jasa surat menyurat; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Aktifitas sub kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian sasaran yaitu:

- a. Menyediakan kebutuhan surat menyurat untuk kelancaran urusan pemerintahan kecamatan
- b. Melaksanakan pembayaran listrik, air dan internet
- c. Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran petugas kebersihan dan petugas administrasi (PTT)

10) Sasaran Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Aktivitas sub kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian sasaran yaitu:

- a. Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pembayaran pajak dan perizinannya dalam rangka menunjang operasional kantor Kecamatan Telaga Bauntung,
- b. Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan AC, komputer, printer sehingga peralatan dan mesin kantor dapat terpelihara dan berfungsi dengan baik guna menunjang aktivitas perkantoran.
- c. Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Seiring dengan bertambahnya usia gedung kantor mengalami beberapa kerusakan sehingga mempengaruhi fungsi gedung sebagai sarana kerja. Dengan terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung ini maka kondisi gedung bisa berfungsi dengan baik sehingga dapat menciptakan lingkungan perkantoran yang baik, aman dan nyaman.

11) Sasaran Meningkatnya Koordinasi Dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dan Kebencanaan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan responsibilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

12) Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan melalui sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Aktifitas yang dilaksanakan adalah pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi-fasilitasi dalam penyaluran bantuan sosial, koordinasi yang baik dengan berbagai pihak dalam mendukung kegiatan untuk kesejahteraan sosial sehingga Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ini mejadi agregat yang baik bagi peningkatan kinerja pemerintah kecamatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat PPKS

13) Sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat melalui sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Seperti Rencana tindak lanjut intervensi pencegahan stunting sudah tersusun dalam roadmap pencegahan dan penurunan stunting Kecamatan Telaga bauntung.

14) Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa melalui sub kegiatan 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Keberhasilan pencapaian sasaran merupakan kontribusi dari meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Aktivitas yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran yaitu :

a. Penyelenggaraan Pra Musrenbang

Rapat Pra Musrenbang dalam rangka menentukan Usulan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Tahun 2025 dilaksanakan pada Februari 2024 bertempat di Aula Kecamatan Telaga Bauntung. Kegiatan Pra Musrenbang dilakukan melalui tatap muka dengan mengikutsertakan perwakilan masing-masing Desa 2 Orang yaitu Pembakal dan Sekretaris Desa, seKecamatan Telaga Bauntung.

b. Penyelenggaraan Musrenbang

Rapat Musrenbang dalam rangka menyepakati Usulan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar sebagai bahan Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025. Kegiatan Musrenbang dilakukan melalui tatap muka dengan mengikutsertakan perwakilan dari masing-masing Desa, kelurahan dan Unsur Muspika serta Satuan Kerja Perangkat daerah yang terkait.

c. Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan ADD

Pembinaan pengelolaan ADD dilaksanakan agar ADD tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Pengelolaan ADD harus dilakukan secara tertib, sesuai ketentuan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah Kecamatan Telaga Bauntung melalui Seksi Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembinaan secara intens guna memastikan ADD tersebut berjalan dengan baik .dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.

- d. melaksanakan evaluasi anggaran dana desa seKecamatan Telaga Bauntung.

Evaluasi anggaran dana desa merupakan kegiatan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan, prioritas nasional, dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan evaluasi anggaran dana desa meliputi Meninjau dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Meninjau lokasi proyek-proyek pembangunan desa, Meninjau laporan realisasi anggaran, Meninjau laporan keuangan desa dan Meninjau kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan

Evaluasi anggaran dana desa bertujuan untuk Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan desa, Memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, Memastikan ketercapaian output dapat lebih maksimal dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Evaluasi anggaran dana desa dilakukan oleh Tim Monev yang melibatkan berbagai pihak, seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tim kecamatan.

- e. Melaksanakan Pembinaan PKK seKecamatan Telaga Bauntung

Kegiatan rutin PKK yang dilaksanakan Kecamatan Telaga Bauntung adalah rapat koordinasi rutin yang mengkoordinir dan berkoordinasi ke T.P.PKK desa dalam hal pembinaan administrasi dan kegiatan 10 program Pokok PKK di desa dan kelurahan

- f. Penyaluran BLT DD

Penyaluran BLT DD di 4 desa seKecamatan Telaga Bauntung yang di laksanakan secara bertahap dalam setahunnya ada 12 tahap setiap bulan 1 kali Pembagian/Pemberian BLT- DD di desa sesuai dengan Peraturan pelaksanaan Penggunaan Dana Desa. Melalui

BLT-DD, pemerintah mengalokasikan dana untuk membantu warga desa dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Penyaluran BLT-DD ini bertujuan untuk mendukung masyarakat kurang mampu secara finansial dan menjadi salah satu langkah konkrit pemerintah dalam membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

g. Musdes Penyusunan RKP Desa

Dilaksanakan di 4 desa SeKecamatan Telaga Bauntung secara Berjadwal adalah forum resmi untuk membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Musdes ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa. Tujuan Musdes Penyusunan RKP Desa adalah untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dilakukan desa selama satu tahun. Hasil Musdes ini akan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun RKP Desa yang resmi. Dalam Musdes Penyusunan RKP Desa inilah, masyarakat dapat menyampaikan usulan dan masukannya. Usulan-usulan tersebut kemudian didiskusikan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan nantinya.

15) Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan

Program yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui kegiatan 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Keberhasilan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan kontribusi dari terlaksananya berbagai kegiatan koordinasi, dan fasilitasi termasuk juga mediasi penanganan konflik yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

16) Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui sub kegiatan 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Aktifitas dari sub kegiatan yang mensupport keberhasilan capaian sasaran antara lain Rakor Pembinaan Linmas, Apel Gabungan Satlinmas, Fasilitasi Posko Pilkada:

a. Rakor Pembinaan Linmas

Perlindungan masyarakat (Linmas) adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara kemandirian, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara sesuai permendagri Nomor 26 tahun 2020. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di desa/kelurahan dilaksanakan oleh Lurah /kepala desa/pembakal dibawah koordinasi Camat. Rakor Linmas tahun ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah dimana Linmas selain berperan dan aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban pilkada juga berperan aktif dalam memastikan bahwa undangan yang hadir terdaftar pada DPT yang bersangkutan

b. Apel Gabungan Pengamanan Pilkada.

Apel gabungan Pengamanan Pilkada dilaksanakan Dalam rangka mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Satlinmas dan TNI-Polri turut berpartisipasi dalam apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Camat Telaga Bauntung. Adanya Kerjasama dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam pengamanan Pilkada sehingga penyelenggaraan Pilkada tahun ini berjalan dengan damai, aman dan lancar

c. Fasilitas Posko Pilkada

Posko bersama Pilkada didirikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada kegiatan di Posko bersama ini. antara lain, melakukan pengamanan kotak suara, memantau kondisi trantib selama masa penyelenggaraan Pilkada dan melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di desa juga menginventarisir serta memberikan saran penyelesaian yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024 serta melaporkan informasi dan laporan pelaksanaan tahapan pilkada secara berjenjang. Adanya sinergi, koordinasi dan kerjasama dari penyelenggara Pilkada tingkat kecamatan dan Panwascam bersama Tiga Pilar agar pelaksanaan Pilkada berjalan tertib, aman dan kondusif.

d. Rakor FKUB dan FKDM

Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilaksanakan setiap tahun bertempat di Kantor Kecamatan Telaga Bauntung. Rakor FKUB bertujuan untuk 1) Memperkuat kerukunan dan toleransi, 2)Mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadaban, 3)Meningkatkan koordinasi internal organisasi FKUB, 4) Mencegah konflik dan radikalisme beragama, 5) Menjaga kerukunan antar umat beragama dan 6) Mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat

FKUB sendiri adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. FKUB memiliki tugas utama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, baik dalam bentuk dialog maupun mediasi sedangkan FKDM adalah wadah untuk mendeteksi dini potensi ancaman, gejala, atau peristiwa bencana di wilayah kecamatan. FKDM juga berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. FKDM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Pembentukan FKDM dilakukan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Tugas FKDM diantaranya menjangkau, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat serta Memberi rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan kewaspadaan dini masyarakat. FKUB dan FKDM berperan sebagai mata dan telinga pemerintah di masyarakat, khususnya dalam hal keamanan dan pembangunan. FKUB dan FKDM juga menjadi upaya untuk membangun sinergitas antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

17) Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sangat penting untuk menjaga ketertiban dan pembangunan di daerah

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya-upaya penertiban dan penegakan perda di Kecamatan Telaga Bauntung.

18) Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum merupakan kunci untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Program yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah melalui pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

19) Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah melalui sub kegiatan 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan 2) Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Aktifitas dari kegiatan yang mensupport keberhasilan capaian sasaran yaitu :

a. Pelaksanaan HUT Proklamasi Kemerdekaan

Pelaksanaan HUT RI ke 79 Tahun 2024 dilaksanakan di lapangan sekolah milik Yayasan Mitra Kasih Kompleks Ciputra diikuti oleh seluruh aparatur kecamatan, kelurahan dan desa, juga dihadiri oleh pelajar, dewan guru dan yayasan Mitra Kasih, Ibu-ibu PKK se Kecamatan Telaga Bauntung dan Instansi vertikal dan UPT-UPT yang ada di Kecamatan Telaga Bauntung.

b. Rakor Forkopincam

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) merupakan wadah koordinasi antara unsur pimpinan di tingkat kecamatan, yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, dan pejabat lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Rakor Forkopimcam bertujuan untuk Meningkatkan sinergi antara lembaga pemerintahan dalam menyelesaikan masalah di tingkat kecamatan, memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan nasional, Menyelesaikan isu-isu strategis seperti keamanan, ketertiban, pelayanan publik, dan pembangunan daerah serta Mendorong pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif melalui musyawarah bersama.

Agenda Rakor membahas program kerja, evaluasi pelaksanaan kegiatan, penanganan isu strategis, serta pengambilan keputusan untuk solusi masalah yang muncul di masyarakat

Hasil yang Diharapkan dari terlaksananya Rakor ini adalah terwujudnya koordinasi yang harmonis antarinstansi di kecamatan, Penyelesaian permasalahan keamanan, pelayanan publik, dan pembangunan secara cepat dan terkoordinasi,

Peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Telaga Bauntung serta Pencapaian target pembangunan daerah sesuai visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Banjar.

20) Sasaran Kinerja Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan.

Program yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Melalui program ini Pemerintah Kecamatan Telaga Bauntung melaksanakan pembinaan-pembinaan dan pengawasan baik terhadap aparatur maupun kinerja pelayanan kepada masyarakat di desa. Selain itu adanya pemberian reward bagi aparatur desa yang berkinerja baik juga berdampak positif terhadap meningkatnya disiplin kerja aparat di pemerintahan desa.

21) Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan yang mendukung Keberhasilan sasaran adalah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui sub kegiatan 1) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mendukung keberhasilan sasaran antara lain :

a. Rakor Pembakal dan perangkat Desa

Rapat Koordinasi (Rakor) Pembakal dan perangkat Desa di Kecamatan Telaga Bauntung merupakan forum komunikasi dan

koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan kepala desa (pambakal) dan lurah. Rakor ini menjadi wadah untuk membahas berbagai isu pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta masalah yang dihadapi desa dan kelurahan dalam lingkup kecamatan.

Agenda Rakor membahas tentang Evaluasi pelaksanaan program, penanganan masalah lokal, penyampaian arahan kebijakan, serta rencana tindak lanjut

Rakor dilaksanakan secara rutin setiap bulan atau sesuai kebutuhan yang mendesak bertempat di Aula Kantor Kecamatan diikuti oleh seluruh aparat pemerintahan kecamatan, aparat desa dan kelurahan se Kecamatan Telaga Bauntung.

b. Rakor Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rakor Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah forum koordinasi antara Kecamatan Telaga Bauntung dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar. Forum ini bertujuan untuk membahas pengelolaan PBB, termasuk target penerimaan, strategi penagihan, penyelesaian tunggakan, serta sosialisasi kebijakan perpajakan kepada perangkat desa, kelurahan, dan masyarakat. Hasil penerimaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kecamatan Telaga Bauntung setiap tahun selalu memenuhi target penerimaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang sudah ditetapkan.

c. Rakor BPD

Rapat koordinasi BPD adalah pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah kecamatan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi terkait Evaluasi kegiatan Pemerintah Desa, Persiapan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) dan sebagai wadah silaturahmi antar BPD se Kecamatan Telaga Bauntung. Rakor dilaksanakan rutin setiap tahun bertempat di Aula Kantor Kecamatan Telaga Bauntung yang dihadiri oleh seluruh BPD se Kecamatan Telaga Bauntung.

8. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

a. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar menunjukkan nilai sebesar **69,67** atau predikat “**B**”. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Akuntabilitas Kinerja **Baik**, artinya terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 7 Laporan Hasil Evaluasi AKIP

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI ANGKA
a	Perencanaan Kinerja	30	20.08
b	Pengukuran Kinerja	30	21.21
c	Pelaporan Kinerja	15	10.37
d	Evaluasi Internal	25	18.00
NILAI			69,67
PREDIKAT			B
SEBUTAN			BAIK

Sumber: LHE AKIP Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024

Hasil evaluasi tahun 2024 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Karena berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar yang disusun sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kemenpan RB pada Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023, telah terjadi perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan akuntabilitas kinerja baik pada level Pemda maupun perangkat daerah.

Dari hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024, terdapat Uraian Hasil Evaluasi sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 20.08 dari nilai maksimal 30. Kecamatan Telaga Bauntung telah menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar telah memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka menengah serta target tahunan. Selain kondisi tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a) Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) belum berlegalitas.
- b) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum seluruhnya dinilai dan diupload pada Website.
- c) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sampai pada level sub kegiatan.
- d) Rencana Aksi belum dipantau secara berkala karena belum terdapat monitoring evaluasi rencana aksi dan tindak lanjut.
- e) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Kecamatan Telaga Bauntung tidak menantang dan realitas, serta belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan

Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya mengingat capaian kinerja Tahun 2023 telah tercapai dan melebihi target tahun 2024.

2) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 21,21 dari nilai maksimal 30,00. Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar telah menyepakati perjanjian kinerja sebagai ukuran kinerja secara formal dan Menyusun laporan kinerja, namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a) Pengukuran data kinerja belum mendukung capaian kinerja karena laporan kinerja belum menggambarkan ketercapaian kinerja seluruh pegawai
- b) Belum dilakukan pemantauan secara berjenjang dan berkelanjutan secara penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- c) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/ penghasilan
- d) Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

3) Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja, Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar Memperoleh 10,37 dari maksimal 15,00. Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) namun Masih terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a) Dokumen Laporan Kinerja belum direviu secara berjenjang
- b) Laporan kinerja belum dipublikasikan pada website.
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan

realisasi kinerja dengan target tahunan namun belum terdapat analisis dan perhitungan capaian kinerja sampai level kegiatan. Dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Kecamatan Telaga Bauntung belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya mengingat target kinerja tahun 2023 telah tercapai dan melampaui target tahun 2024 dan belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

4) Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi kinerja Internal Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 18,00 dari nilai maksimal 25,00. Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar telah melaksanakan Evaluasi Kinerja, Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a) Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat, namun Tim yang dibentuk untuk melakukan pengawalan implementasi AKIP internal belum ditetapkan/ diuraikan tugas untuk masing-masing jabatan dan tim tersebut, sehingga belum dapat diketahui perbedaan penugasan antara Penanggung Jawab, Sekretaris, Ketua, dan Anggota
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum seluruhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, dimana berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa kelemahan yang tidak terdeteksi saat Penilaian Mandiri seperti penetapan target yang kurang menantang, pengukuran kinerja tidak dilakukan berkelanjutan dan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas kinerja serta kekurangan penyajian informasi dalam LKJIP

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Camat Telaga Bauntung Kabupaten Banjar beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Melengkapi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara lengkap dan memadai
- 2) Menetapkan target kinerja dalam Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisi perbaikan kinerja sebelumnya;
- 3) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- 4) Menyusun LkjiP secara lengkap dengan menyajikan informasi capaian Kinerja yang telah diperjanjikan kepada seluruh pegawai, meuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome/ output penting, menyajikan data kinerja yang andal;
- 5) Tim yang dibentuk untuk melakukan pengawalan implementasi AKIP Internal dipetakan/ diuraikan tugas untuk masing-masing jabatan dalam tim tersebut, sehingga dapat diketahui perbedaan penugasan antara Penanggung Jawab, Sekretaris, Ketua, dan anggota;
- 6) Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan mendalam dan melaksanakan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan serta memuat kesepakatan dengan pihak terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan tentang siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.

c. Tindak Lanjut

Berikut adalah tindak lanjut yang dapat diusulkan berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan: **Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024**

1) Melengkapi Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara Lengkap dan Memadai

- Setiap pegawai wajib menyusun dan mengisi PK serta SKP sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.
- Dokumen harus memenuhi standar kelengkapan administratif dan substansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Proses validasi dan verifikasi dokumen dilakukan oleh atasan langsung sebelum ditetapkan.
- Evaluasi terhadap PK dan SKP dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Haris Utomo, S.STP., M.Si

Jabatan : Plh. Camat Telaga Bauntung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhmad Fydayeen

Jabatan : Pjs. Bupati Banjar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 2 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. Bupati Banjar,



Akhmad Fydayeen

Pihak Pertama,
Plh. Camat Telaga Bauntung,



Dr. Haris Utomo, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 1985110920041 2 1002

Gambar 3. 2 Perbaikan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

2) Menetapkan Target Kinerja dalam Perencanaan Kinerja Berdasarkan Hasil Analisis Perbaikan Kinerja Sebelumnya

- Proses perencanaan kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi terhadap pencapaian kinerja periode sebelumnya.
- Analisis dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta peluang perbaikan.

- Target kinerja harus bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound) agar mudah diukur dan dievaluasi.
- Seluruh target dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kerja bagi seluruh pegawai.



Gambar 3. 3 penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2024)

3) Melakukan Pengukuran Kinerja secara Berjenjang dan Berkelanjutan serta Penyesuaian Strategi dalam Mencapai Kinerja yang Efektif dan Efisien

- Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (bulanan, triwulanan, dan tahunan) dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan.
- Setiap unit kerja bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan dan pelaporan hasil kinerja kepada pimpinan secara sistematis.

- Strategi yang digunakan dalam pencapaian kinerja harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi internal maupun eksternal organisasi.
- Jika ditemukan kendala dalam pencapaian target, segera dilakukan perbaikan strategi melalui diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait.



Gambar 3. 4 Koordinasi internal dalam rangka pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit sampai pada kinerja staf/pelaksana

4) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) secara Lengkap

- Laporan harus mencerminkan pencapaian target yang telah diperjanjikan dan memuat evaluasi mendalam terhadap kinerja organisasi.
- Data yang disajikan harus valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta menggambarkan capaian output dan outcome yang nyata.
- Analisis terhadap faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja dilakukan secara menyeluruh.
- Laporan harus mencantumkan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja di periode berikutnya.



Gambar 3. 5 Koordinasi Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) secara Lengkap

5) Pembentukan Tim Pengawasan Implementasi AKIP Internal

- Tim harus memiliki struktur yang jelas dengan tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi untuk setiap anggota.
- Penanggung jawab bertugas dalam pengawasan dan koordinasi umum pelaksanaan AKIP internal.
- Sekretaris bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, dokumentasi, dan penyusunan laporan hasil implementasi.
- Ketua tim bertugas dalam memimpin pelaksanaan pengawasan AKIP serta memastikan seluruh tugas berjalan sesuai rencana.
- Anggota tim bertugas melaksanakan tugas teknis yang telah ditetapkan, termasuk pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi AKIP.



Gambar 3. 6 Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pengawasan Implementasi AKIP Internal

6) Melaksanakan Evaluasi Internal secara Berkala dan Menindaklanjuti Hasil Evaluasi

- Evaluasi dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana kerja organisasi.
- Diskusi dan pembahasan hasil evaluasi melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pimpinan dan unit kerja yang bersangkutan.
- Kesepakatan hasil evaluasi harus dituangkan dalam dokumen resmi yang mencantumkan pihak yang bertanggung jawab dan batas waktu penyelesaian rekomendasi.
- Implementasi tindak lanjut hasil evaluasi harus diawasi dan dilaporkan secara berkala untuk memastikan efektivitas perbaikan yang dilakukan.



Gambar 3. 7 Rapat Evaluasi Internal secara Berkala dan Menindaklanjuti Hasil Evaluasi

Dengan langkah-langkah tindak lanjut ini, diharapkan Kecamatan Telaga Bauntung dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta memperkuat evaluasi internal guna mencapai akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Tindak lanjut ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banjar.

C. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Jenis Belanja

Realisasi pelaksanaan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dikelola Kecamatan Telaga Bauntung tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.008.766.368 (77,82%) dari target sebesar Rp. 2.581.189.967 dengan rincian untuk Belanja Operasi realisasi dan capaian sebesar Rp. 2.559.104.967 (77,63%) dari target sebesar Rp. 2.559.104.967, serta realisasi dan capaian Belanja Modal sebesar Rp. 22.085.000 (100%) dari target sebesar Rp. 22.085.000. Untuk Realisasi jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Realisasi Jenis Belanja Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024			
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	2.581.189.967,00	0,00	2.008.766.368,00	2.008.766.368,00	77,82
5.1	BELANJA OPERASI	2.559.104.967,00	0,00	1.986.681.368,00	1.986.681.368,00	77,63
5.1.1	Belanja Pegawai	1.940.772.783,00	0,00	1.451.522.087,00	1.451.522.087,00	74,79
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.029.520.783,00	0,00	742.589.287,00	742.589.287,00	72,13
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	872.012.000,00	0,00	671.192.800,00	671.192.800,00	76,97
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.240.000,00	0,00	37.740.000,00	37.740.000,00	96,18
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	618.332.184,00	0,00	535.159.281,00	535.159.281,00	86,55
5.1.2.01	Belanja Barang	185.539.528,00	0,00	172.161.400,00	172.161.400,00	92,79
5.1.2.02	Belanja Jasa	186.415.456,00	0,00	128.189.912,00	128.189.912,00	68,77
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	121.877.200,00	0,00	115.136.867,00	115.136.867,00	94,47
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	124.500.000,00	0,00	119.671.102,00	119.671.102,00	96,12
5.2	BELANJA MODAL	22.085.000,00	0,00	22.085.000,00	22.085.000,00	100,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.085.000,00	0,00	22.085.000,00	22.085.000,00	100,00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.085.000,00	0,00	22.085.000,00	22.085.000,00	100,00
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	100
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	100
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	100
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(2.581.189.967,00)	0,00	(2.008.766.368,00)	(2.008.766.368,00)	100,00

Sumber: LRA pada SIPD Langkar Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Untuk Realisasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.414.585.967	1.851.625.368	76,69
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.656.000	5.706.000	85,76
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	644.000	644.000	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	832.000	682.000	81,97
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	832.000	682.000	81,97
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.414.000	1,164,000	82.32
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.170.000	1,020,000	87.18
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	926.000	776,000.00	83.80
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	838.000	738.000	88,07
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.932.068.783	1.444.318.087	95,35
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.901.532.783	1.413.782.087	74.35
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.240.000	30.240.000	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	296.000	296.000	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.100.000	7.600.000	83,52
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000	100.000	100
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	7.500.000	83.33
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	100
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.500.000	1.500.000	100

1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.060.528	149.562.002	94,03
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	1,755,000	97.50
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.418.500	3,946,500	89.32
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.977.000	11,685,000	97.56
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.630.028	2,564,400	97.50
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	2,940,000	98.00
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.235.000	126,671,102	93.67
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.918.000	23.918.000	100
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.918.000	23.918.000	100
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.611.456	93.099.912	62,64
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1,800,000	100.00
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.031.456	7,703,000	69.83
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.780.000	83,596,912	61.57
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.671.200	125.921.367	94,20
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.731.200	105,225,867	95.03
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.804.000	8,695,500	80.48
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.136.000	12,000,000	98.88
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.000.000	20.000.000	92,31
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.000.000	8.000.000	100
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.000.000	8.000.000	100
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.000.000	12.000.000	92,31

2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13.000.000	12.000.000	92,31
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.400.000	26.850.000	82,87
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.400.000	26.850.000	82,87
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.700.000	9.700.000	100
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.700.000	17.150.000	75.5
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.990.000	53.790.000	97,81
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.150.000	5.350.000	87.0
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.100.000	3.700.000	90.24
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.050.000	1.650.000	80.49
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48.840.000	48.440.000	99,18
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48.840.000	48.440.000	99,18
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.214.000	50.700.000	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.214.000	50.700.000	100
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.550.000	21.550.000	100
5.1.2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	30.664.000	29.150.000	95.06

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.000.000	6.000.000	100
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000	6.000.000	100
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000	1.500.000	100
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.500.000	1.500.000	100
6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.500.000	1.500.000	100
6.1.4	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.500.000	1.500.000	100

Sumber : SIPD Langkar Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024

3. Realisasi Anggaran berdasarkan Pencapaian Kinerja

Untuk Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	79	94.38	119.47	2.581.189.967	2.008.965.368	77,84
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung	76	72.54	95.32	2.414.585.967	1.851.625.368	76,7
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100	100	6.656.000	5.706.000	85,76%
4	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	100	100	100	1.932.068.783	1.444.318.087	74.78
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100	100	9.100.000	7.600.000	83,52

6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100	1.500.000	1.500.000	0
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	159.060.528	149.562.002	94,03
8	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100	100	100	23.918.000	23.918.000	0
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	148.611.456	93.099.912	62.64
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	133.671.200	125.921.367	94.20
11	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	8.000.000	8.000.000	0
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	13.000.000	12.000.000	92.31
13	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	32.400.000	26.850.000	82.87
14	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	100	6.150.000	5.350.000	87.0
15	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi	100	100	100	48.840.000	48.440.000	99.18

16	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	100	100	100	52.214.000	50.700.000	97.10
17	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	6.000.000	6.000.000	0

Sumber : SIPD Langkar dan SIMONDALEV Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024

a. Penjelasan tentang Realisasi Anggaran

Berdasarkan data pada tabel 3.9 tentang Realisasi Anggaran berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** dengan indikator kinerja **Nilai Evaluasi Kecamatan** yang memiliki target kinerja sebesar **79 Nilai**, realisasi kinerja sebesar **94,38 Nilai** dan capaian kinerja sebesar **119.47%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 2.581.189.967** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.008.965.368** dan capaian anggaran sebesar **77,84%**.
- 2) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian** dengan indikator kinerja **Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung** yang memiliki target kinerja sebesar **76 Indeks**, realisasi kinerja sebesar **72.54 Indeks** dan capaian kinerja sebesar **95.45%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 2.414.585.967** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.851.625.368** dan capaian anggaran sebesar **76,7%**.
- 3) Sasaran Kinerja **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas** dengan indikator kinerja **Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**.

Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 6.656.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.706.000** dan capaian anggaran sebesar **85,76%**.

- 4) Sasaran Kinerja **Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas** dengan indikator kinerja **Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 1.932.068.783** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.444.318.087** dan capaian anggaran sebesar **74,78%**.
- 5) Sasaran Kinerja **Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas** dengan indikator kinerja **Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 9.100.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 7.600.000** dan capaian anggaran sebesar **83,52%**.
- 6) Sasaran Kinerja **Lancarnya administrasi kepegawaian daerah** dengan indikator kinerja **Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 1.500.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.500.000** dan capaian anggaran sebesar **100%**.
- 7) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya kegiatan kantor** dengan indikator kinerja **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 159.060.528** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 149.562.002** dan capaian anggaran sebesar **94,03%**.

- 8) Sasaran Kinerja **Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan** dengan indikator kinerja **Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 23.918.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 23.918.000** dan capaian anggaran sebesar **100%**.
- 9) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor** dengan indikator kinerja **Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 148.611.456** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 93.099.912** dan capaian anggaran sebesar **62,64%**.
- 10) Sasaran Kinerja **Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan** dengan indikator kinerja **Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 133.671.200** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 125.921.367** dan capaian anggaran sebesar **94,20%**.
- 11) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** dengan indikator kinerja **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 8.000.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 8.000.000** dan capaian anggaran sebesar **100%**.

- 12) Sasaran Kinerja **Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** dengan indikator kinerja **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 13.000.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 12.000.000** dan capaian anggaran sebesar **92,31%**.
- 13) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan indikator kinerja **Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 32.400.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 26.850.000** dan capaian anggaran sebesar **82,87%**.
- 14) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** dengan indikator kinerja **Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 6.150.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.350.000** dan capaian anggaran sebesar **87,0%**.
- 15) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** dengan indikator kinerja **Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 48.840.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 48.440.000** dan capaian anggaran sebesar **99,18%**.

- 16) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan indikator kinerja **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 52.214.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 50.700.000** dan capaian anggaran sebesar **97,10%**.
- 17) Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan indikator kinerja **Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** yang memiliki target kinerja sebesar **100%**, realisasi kinerja sebesar **100%** dan capaian kinerja sebesar **100%**. Juga memiliki target anggaran sebesar **Rp. 6.000.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.000.000** dan capaian anggaran sebesar **100%**.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024 merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun 2024 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Realisasi capaian kinerja Sasaran Strategis **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan** dengan indikator kinerja **Nilai Evaluasi Kecamatan** dengan target tahun 2024 sebesar **79 Nilai**, realisasi kinerja sebesar **94,38 Nilai**, dan capaian sebesar **119.47%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur di Kecamatan khususnya dalam penyusunan Laporan SAKIP dan laporan lainnya untuk memperoleh Laporan yang baik dan akuntabel.
2. Adanya pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
3. Pelaksanaan Koordinasi yang lebih intens lagi baik itu pada internal Kecamatan Telaga Bauntung maupun dengan eksternal Kecamatan Telaga Bauntung.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kecamatan Telaga Bauntung Tahun 2024